

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memiliki pemerintahan yang baik, orang-orang yang bertanggung jawab atas keuangan pemerintahan perlu dituntut untuk jujur, dan bertanggung jawab guna pemerintahan yang baik. Untuk memastikan mereka melakukan pekerjaan dengan baik, mereka harus membuat laporan tentang bagaimana mereka menggunakan uang pemerintahan tersebut. Laporan keuangan seperti kartu laporan yang menunjukkan seberapa baik kinerja pemerintah atau organisasi dengan uang mereka. Ini mencakup hal-hal seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Laporan keuangan yang baik dapat membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih baik di masa depan (Silitonga, 2016).

Salah satu fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor public saat ini yaitu beberapa pemerintah daerah tidak sepenuhnya memahami bagaimana laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat pengambilan Keputusan. Sejauh ini laporan keuangan bagi pemerintah daerah hanya menganggap sebagai formalitas tanpa memfaatkannya secara optimal dalam perencanaan dan penganggaran. Dilakukan penelitian ini diharapkan dapat menggali sejauh mana pemerintah daerah memahami dan memiliki tujuan yang jelas dalam penggunaan laporan keuangan.

Sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan laporan keuangan mereka secara akurat dan dapat dipercaya. Ini membantu orang yang membaca laporan percaya bahwa pemerintahan berjalan dengan baik secara finansial. Ketika sebuah pemerintah membuat laporan tentang keuangan mereka, mereka harus mencatatkan yang sebenarnya tentang anggaran keuangan yang mereka miliki dan bagaimana keadaan mereka.

Laporan ini dapat membantu orang mengetahui apakah orang yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan dengan baik dengan keuangan tersebut. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah laporan yang menunjukkan seberapa baik kinerja pemerintah dalam mengelola uang mereka. Hal ini memberi tahu kita apakah mereka punya cukup uang dan bagaimana mereka membelanjakannya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa "Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan". Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa memberi tahu kita apakah laporan keuangan perusahaan bagus atau tidak.

Surah Al-Maidah Ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ غَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ

لِلنَّفْسِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022, memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Klaten. Pemerintah Kabupaten Klaten mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 5 kali berturut – turut sejak tahun 2018 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan dari Jawa Tengah (<https://klatenkab.go.id>). Namun pada tahun 2022, meski meraih WTP, BPK Jateng masih menemukan sejumlah permasalahan terhadap LKPD Tahun 2022 yaitu berupa pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang mengakibatkan kelebihan dalam pembayaran. Hal ini menunjukkan sistem pengendalian internal yang lemah.

Pada hasil prestasi yang mendapatkan opini WTP sebanyak 5 kali berturut – turut, menandakan bahwa LKPD Kabupaten Klaten telah disajikan secara jujur, transparansi, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Hal ini disebabkan rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan, seperti adanya akuntan personalia yang sudah kompeten dalam menyajikan dan menyusun laporan keuangan, pejabat pengelola keuangan SKPD sepenuhnya telah memahami tanggung jawab dan fungsi yang ditugaskan kepadanya. Kualitas pembuatan laporan keuangan meningkat, begitu pula dengan administrasi pengelolaan aset di masing-masing SKPD yang didasarkan oleh dorongan yang kuat dan motivasi untuk melakukan tanggung jawab dalam pelaksanaan APBD secara jujur, transparansi, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Seiring perkembangan dunia usaha yang semakin cepat, audit internal semakin menjadi alat atau metode untuk mengatasi kemungkinan bahaya. Menurut Institute of Internal Auditing (IIA) dalam Ardeno Kurniawan (2015), menjelaskan Internal audit merupakan kegiatan penjaminan yang tidak memihak dan objektif. Ini juga merupakan layanan konsultasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan (Erfiansyah dan Kurnia, 2018). Mereka juga memberikan saran dan umpan balik untuk membantu semua orang dalam melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik. Pada awalnya, seorang auditor hanya memeriksa berbagai hal untuk memastikan semuanya bekerja dengan lancar dan benar. Tapi sekarang mulai berubah, mereka juga dapat memberikan saran untuk membantu membuat semuanya berjalan lebih baik dari sebelumnya. Didalam pemerintahan memiliki tim yang disebut Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawab atas memeriksa apakah semuanya bekerja dengan baik di pemerintahan atau bisa disebut sebagai audit internal.

Akuntansi lingkungan adalah proses menghitung, mengidentifikasi, dan mengungkapkan kepada bisnis biaya yang terkait dengan operasinya. Mengenai pengungkapan pengeluaran biaya yang telah dihitung sesuai aturan yang berlaku didalam akuntansi keuangan lingkungan. Namun saat ini belum ada standar peraturan atau undang-undang yang mewajibkan akuntansi keuangan lingkungan, sehingga masih bersifat opsional (Sawitri, 2017)

Seberapa baik pengendalian internal dilaksanakan oleh lembaga pemerintah daerah juga mempengaruhi seberapa baik penulisan laporan

keuangan pemerintah daerah. Menggabungkan penyebab internal yang lemah betapa sulitnya menemukan penipuan dan kesalahan dalam proses akuntansi untuk mengumpulkan bukti audit atas data akuntansi palsu (Ida Ayu Enny Kiranayanti, 2016). Sistem pengendalian internal adalah unsur lain yang berkontribusi terhadap pengendalian internal meningkatkan kaliber laporan keuangan. Untuk mendukung pengambilan keputusan yang tidak memihak dan perilaku akuntabel, tujuan sistem pengendalian internal adalah untuk melayani sebagai sumber informasi yang independen tentang berbagai operasi organisasi.

Akuntansi keuangan daerah sangat penting untuk kelancaran pengelolaan keuangan daerah. Meskipun pelaporan keuangan pemerintah sejauh ini baik di tingkat federal dan regional, tampaknya mereka belum memenuhi permintaan informasi penggunaannya. Pemerintah tidak memiliki manajemen yang baik karena kurangnya pengetahuan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, setiap entitas harus melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau internasional yang dikenal dengan International Accounting Standards Board (IASB), yang sekarang dikenal dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) (Defitri, 2018)

Faktor audit internal memegang peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan, khususnya dalam hal kepatuhan kebijakan dan prosedur. Dalam hal tersebut, audit internal menjamin bahwa peraturan dan proses tegas yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan dipatuhi dengan baik oleh seluruh departemen dan unit bisnis. Hal ini membantu menjamin

bahwa informasi keuangan yang diberikan dalam laporan keuangan merupakan gambaran akurat dari transaksi bisnis sebenarnya. Dengan berfokus pada faktor yang tersebut, audit internal dapat memberikan keyakinan lebih kepada pihak yang menggunakan laporan keuangan bahwa informasi yang diberikan merupakan representasi akurat dari posisi dan kinerja keuangan perusahaan.

Faktor akuntansi lingkungan dalam laporan keuangan merujuk pada bagaimana pemerintah mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan data keuangan terkait aspek lingkungan dalam operasinya. Hal ini menjadi semakin penting seiring dengan semakin luasnya perhatian terhadap tantangan lingkungan hidup, dan berbagai pemangku kepentingan termasuk investor, konsumen, dan pemerintah memberikan tekanan pada dunia usaha untuk lebih bertanggung jawab secara sosial. Pemerintah yang peduli terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan sering kali berupaya melaporkan informasi ini secara sukarela atau mengikuti kriteria yang sesuai, seperti upaya Global Reporting Initiative (GRI) atau Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Faktor sistem pengendalian internal dalam pelaporan keuangan mengacu pada fitur dan proses yang diterapkan perusahaan untuk menjamin bahwa transaksi keuangan didokumentasikan secara akurat, aset dilindungi dari kehilangan atau penipuan, dan laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan. Dengan memasukkan elemen ini, dapat mengurangi kemungkinan kesalahan atau penipuan dalam laporan keuangan mereka,

sehingga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan yang diberikan.

Faktor sistem akuntansi keuangan daerah dalam laporan keuangan merupakan penyusunan, pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan informasi keuangan oleh badan pemerintah daerah. Dengan mempertimbangkan faktor tersebut, organisasi pemerintah daerah dapat memberikan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya, memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan dan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan seperti diatas, maka penelitian ini mengangkat judul penelitian yaitu “**Pengaruh Audit Internal, Akuntansi Lingkungan, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**” untuk mengetahui secara empiris Pengaruh Audit Internal, Akuntansi Lingkungan, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk memberikan penjelasan yang bermanfaat tentang komponen yang mempengaruhi kegunaan laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut

1. Apakah audit internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah akuntansi lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh audit internal terhadap kualitas laporan keuangan
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh akuntansi lingkungan terhadap kualitas laporan keuangan
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang dapat di peroleh dari hasil penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi peneliti lain tentang kualitas laporan keuangan dengan menggunakan variabel yang telah diteliti pada organisasi perangkat daerah lain.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk instansi pemerintah daerah yang untuk memanfaatkan fungsi dari laporan keuangan dan dapat dijadikan pertimbangan pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan yang lebih baik.